

NILAI INTEGRITAS DIY TERTINGGI NASIONAL

Cegah Korupsi dari Lingkup Terkecil

YOGYA (KR) - Nilai Integritas DIY tahun 2021 menjadi yang tertinggi secara nasional untuk kategori Pemerintah Daerah. Hal itu diperkuat hasil survei penilaian integritas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana DIY memperoleh nilai 82,81. Nilai Integritas DIY ini sudah berada di atas target nasional 72,84.

"Hasil penilaian ini merupakan survei yang telah dilakukan 2021, lalu diumumkan 2022 ini. Dan KPK sekarang juga tengah melakukan penilaian integritas untuk tahun 2022, dan akan diumumkan pada 2023 nanti," kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Brigjen Pol Kumbul Kuswidjanto Sudjadi dalam acara Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas di Hotel Alana Yogyakarta, Rabu (2/11). Kumbul menjelaskan, penilaian integritas dilakukan berdasarkan beberapa indikator, di antaranya integritas para penyelenggara pemerintahan atau ASN, pengelolaan anggaran, pengelolaan sumber daya manusia, transparansi, dan sosialisasi antikorupsi yang dilakukan. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, dalam upaya pemberantasan korupsi, selama ini Pemda DIY lebih kepada

membangun sistem. Pemda DIY juga melakukan controlling terhadap semua yang berjalan. Sultan mengungkapkan, Pemda DIY tidak mencari kesalahan, tapi jika ada yang melakukan kesalahan, penegakan hukum akan dilakukan. Menurutna, para pejabat di Pemda DIY sudah tahu jika ada yang melanggar hukum, tidak akan mendapat bantuan hukum dari Pemda DIY. "Kami tidak pernah membantu (pelanggar hukum), apalagi sampai menyediakan pembela. (Jika melanggar hukum) itu sudah urusan pribadi yang justru merusak struktur yang ada," imbuh Sultan. Sebagai upaya peningkatan integritas pencegahan korupsi, Pemda DIY mulai tahun 2022 ini juga telah melakukan penambahan dalam sistem manajemen yakni pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat ke-

lurahan/kalurahan. "Nanti harapan saya, lurah maupun perangkat desanya akan ikut menandatangani pakta integritas, sehingga dari level provinsi hingga kabupaten/kota sampai desa, semua bersepakat tidak akan melakukan tindakan korupsi," harap Sultan. Adapun soal upaya mewujudkan keluarga berintegritas, Sultan mewakili Pemda DIY mengapresiasi pelaksanaan Program Keluarga Berintegritas yang dijalankan KPK sebagai upaya pencegahan korupsi. Karena pencegahan korupsi yang dimulai dari lingkup terkecil diharapkan dapat menjadi bibit-bibit baik dalam membentuk peradaban yang jujur dan berintegritas. "Dari keluarga jugalah, dapat ditanamkan nilai-nilai hidup sederhana, melalui prinsip-prinsip *sak-madya, gemi, nastiti, ngati-ati*. Pengamalan norma kejujuran juga sebenarnya dapat dilakukan dengan sederhana. Terkadang, orangtua tidak pernah mengaitkan menyontek atau menyerobot antrean sebagai bentuk perilaku koruptif. Padahal dalam hal ini korupsi adalah mengambil hak orang lain untuk kepentingan diri sendiri," papar Sultan. (Ria)-d



KR-Antara/Andreas Fitri Atmoko

YOGYAKARTA KOMIK WEEKS: Pengunjung mengamati karya pada Pameran Yogyakarta Komik Weeks 2022 bertajuk 'Aksi Transisi' di Jogja National Museum, Yogyakarta, Rabu (2/11). Pameran yang menampilkan karya sekitar 36 komikus Indonesia tersebut menjadi media komunikasi antarkomikus serta media pengenalan komik kepada masyarakat.

TERHADAP MANTAN PENGURUS BANK GAGAL
LPS Konsisten Lakukan Tindakan Hukum

JAKARTA (KR) - Sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh pengembalian (recovery) aset bank gagal akibat adanya fraud, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan kewenangan dan mandat yang dimilikinya telah melakukan tindakan hukum berupa pengajuan gugatan kepada mantan pengurus dan/atau pemegang saham, yang menyebabkan bank gagal dan dicabut izin usahanya. "Upaya pengajuan gugatan dilakukan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan mantan pengurus ataupun pemegang saham bank gagal, sehingga mengakibatkan kerugian bagi LPS akibat tidak optimalnya biaya penjaminan simpanan yang telah dibayarkan oleh LPS," ujar Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar melalui keterangan resminya di Jakarta, Rabu (2/11). Gugatan yang telah diajukan LPS antara lain terhadap mantan pengurus PT BPR Tripanca Setiadana di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, mantan pengurus dan pemegang saham BPR Citraloka Danamandiri di Pengadilan Negeri Bandung, mantan pengurus dan pemegang saham BPR Tripilar Arthajaya serta pihak terkait di Pengadilan Negeri Yogyakarta, mantan

pengurus BPR Multi Artha Mas Sejahtera di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mantan pengurus BPR Kudamas Sentosa di Pengadilan Negeri Surabaya, mantan pengurus BPRS Al Hidayah di Pengadilan Agama Bangil, serta mantan pengurus BPR Efita di Pengadilan Negeri Depok. "Kemudian, terkait dengan perkara-perkara yang diajukan, terdapat beberapa perkara yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap dan dilanjutkan dengan pengajuan eksekusi putusan yakni perkara BPR Tripanca Setiadana, BPR Citraloka Danamandiri, BPR Tripilar Arthajaya, BPR Kudamas Sentosa, BPRS Al-Hidayah dan BPR Efita," jelasnya. Menurut Ary Zulfikar, pada 2022 dengan dibantu oleh Tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Agung RI, telah melaksanakan tindakan hukum tegas dengan mepailitkan mantan pengurus BPR Citraloka Dana Mandiri (BPR CDM). Selain mengajukan gugatan, lanjut Ary, LPS juga telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap mantan pengurus dan pemegang saham PT BPR Tripilar Arthajaya (BPR Tripilar Yogyakarta) serta pihak terkait. (San)-d

SOAL MENTERI JADI CAPRES/CAWAPRES

Presiden: Jika Mengganggu Dievaluasi

JAKARTA (KR) - Presiden Joko Widodo menegaskan jajarannya untuk tetap mengutamakan tugasnya sebagai menteri meski berkontestasi dalam Pemilu 2024. Namun jika mengganggu, akan dievaluasi. "Tugas sebagai menteri tetap harus diutamakan," kata Presiden Jokowi di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/11), menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa menteri atau pejabat setingkat menteri tidak perlu mengundurkan diri jika mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada Pemilu 2024 mendatang. Meski demikian, Presiden mengatakan bahwa dirinya akan melakukan evaluasi kinerja jajarannya apabila tidak dapat melakukan tugas dengan baik. "Tetapi kalau kita lihat nanti mengganggu ya akan dievaluasi apakah memang harus cuti panjang banget atau tidak," ungkapnya. MK membolehkan menteri yang ingin maju sebagai calon presiden

atau calon wakil presiden tidak perlu mundur dari jabatannya sepanjang mendapatkan persetujuan dari Presiden dan cuti/nonaktif. Putusan ini berdasarkan permohonan dari Partai Garuda yang menguji Pasal 170 ayat (1) Undang Undang Pemilu. Putusan itu tertuang dalam amar Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar Senin (31/10/2022), di Ruang Sidang Pleno MK. (Sim)-f

Ketua Komisi A DPRD DIY Tegaskan Komitmen Pemilu 2024 Bermartabat

Badan Kesbangpol DIY Gencar Sosialisasi Pemilu



Para pembicara saat menyampaikan pandangannya di Hotel Sagan Heritage Yogya..



Para pembicara saat sedang menyampaikan materinya dalam acara workshop di Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial DIY.

PEMILIHAN UMUM (Pemilu) 2024 menjadi faktor penentu terbentuknya pemerintahan yang lebih baik yang menjadi harapan masyarakat. Agar terwujud, maka dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan Pemilu yang bermartabat. Tidak ada lagi politik identitas dan hilangnya praktik money politics. Terhadap keinginan tersebut, Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY melakukan kegiatan sosialisasi gencar, dengan harapan proses Pemilu 2024 sesuai harapan. "Pemilu 2024 ini harus lebih bagus dari sebelumnya. Harus lebih bermartabat," ungkap Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto ST Msi yang menjadi salah satu pembicara dalam Workshop Pendidikan Politik dengan Tema "Strategi Mewujudkan Pemilu tahun 2024 yang Mengedepankan

Persatuan dan Kesatuan Bangsa" yang digelar Dinas Kesbangpol DIY di Balai Besar Diklat Kesejahteraan Sosial, Jalan Veteran Muja Muju, Rabu (2/11). Selain Eko Suwanto, workshop juga menghadirkan pembicara lainnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Siti Ghoniyatun, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta, Muhammad Muslimin SH SAg dan Dosen Fisipol UGM, Dr Mada Sukmajati. Di tempat berbeda di hari yang sama Dinas Kesbangpol DIY juga menggelar acara serupa di Hotel Sagan Heritage. Adapun nara sumber yang tampil Sudaryanto, SH (Komisi A, DPRD DIY), Ahmad Shidqi (Wakil Ketua KPUD DIY), Bawaslu Kota : Noor Harsya Aryo Samudro, SSn MAP. Eko Suwanto menegaskan komitmen Komisi A DPRD DIY untuk mewujudkan Pemilu 2024 bermartabat dan berbudaya untuk Pemilu 2024. Pengalamannya dalam pelaksanaan Pemilu sebelumnya, di mana ditemukan perilaku tidak bermartabat. Seperti pengalihan suara dari satu partai ke partai lainnya, DPT yang tidak benar dan

tidak tepat, hingga adanya penduduk yang sudah meninggal masuk DPT. "Meski demikian, secara keseluruhan, pelaksanaan Pemilu di DIY tahun lalu tergolong baik, berkat peran KPU, Bawaslu, Pemda dan pihak terkait di DIY," ungkap Eko Suwanto. Namun demikian diharapkan pada Pemilu 2024 mendatang bisa lebih baik. Hal-hal yang ditemukan di Pemilu sebelumnya, tidak lagi terjadi ke depannya. Sejumlah persoalan dan tantangan yang bakal dihadapi dalam Pemilu mendatang disampaikan Eko Suwanto. Dan juga mengantisipasi, agar tidak terjadi kembali. Salah satunya adalah jangan sampai masyarakat kehilangan suaranya di saat hari H Pemilu, di antaranya karena sedang dirawat di rumah sakit. Karena itu, dari saat perlu diantisipasi dengan duduk bersama antar instansi, agar setiap Rumah Sakit terdapat TPS khusus. Langkah lainnya, dengan terus melakukan pemutakhiran data kependudukan. "Komisi A DPRD DIY dan Pemda DIY melakukan percepatan perekaman e-KTP, koordinasi lain terkait

Akta Kematian, Pendudukan Pindah Datang, dan lainnya. Sehingga diharapkan dapat mengurangi penduduk yang kehilangan suaranya karena persoalan pendataan," ujarnya. Karena itu Eko menegaskan bahwa KPU bertanggung jawab menjamin hak konstitusional warga negara untuk dapat menggunakan haknya dipilih dan memilih sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dosen Fisipol UGM, Dr Mada Sukmajati mengingatkan bahaya politik uang. Karena dampaknya akan buruk bagi kehidupan demokrasi dan kualitas hasil pembangunan. Namun demikian, tak dapat dipungkiri banyak faktor yang menyebabkan praktik money politics begitu hidup di Indonesia. Adapun faktor tersebut, yakni faktor politik dimana tingkat kepercayaan yang rendah terhadap parpol, pemilu, dan parlemen serta politik dalam arti luas. Faktor ekonomi, yakni rendahnya tingkat pendapatan ekonomi masyarakat, tingginya pengangguran, dan kesenjangan ekonomi yang lebar antara yang punya dan yang

tidak punya. Faktor hukum yang tidak dapat menjangkau praktek politik uang (tidak diatur dengan baik dan rendahnya penegakan hukum) Faktor sosial-budaya dimana hidupnya budaya memberi dan menerima akibat politik uang. Serta ikatan politik yang lemah antara rakyat dan wakil rakyat di eksekutif dan legislatif. "Praktik money politics dampaknya sangat buruk. Di antaranya, maraknya korupsi di kalangan pejabat publik. Munculnya politik transaksional. Kebijakan publik yg tidak berpihak kepada publik. Selain itu kesejahteraan sosial tidak tercapai. Siti Choniyatun berharap kepada masyarakat untuk lebih menyadari perannya untuk sukseskan Pemilu. Bagaimanapun peran masyarakat sangat penting untuk segera mewujudkannya. Demikian pula Muhammad Muslimin berharap masyarakat bisa menyadari perannya. Yakni menciptakan Pemilu yang bermartabat. Harapannya terpilih orang-orang yang secara sadar untuk memajukan Indonesia. Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol DIY, Slamet SSos MSi mengemukakan, untuk menggencarkan sosialisasi Pemilu 2024, pihaknya untuk bulan November ini mengadakan sosialisasi sebanyak 24 putaran, tersebar di seluruh kabupaten dan Kota di DIY. "Adapun tujuannya untuk mengantisipasi pelaksanaan pemilu 2024, khususnya menjaga persatuan dan kesatuan," ujarnya. Selain itu, juga sekaligus mengimbau mengimbau agar dalam panitia adHoc pelaksanaan pemilihan, diambil tenaga muda yang stamina dan kesehatan yang baik dan kemampuan IT yang baik. "Pengalaman tahun lalu, marathon dalam bekerja. Tidak kalah pentingnya, tingkat partisipasi masyarakat tetap terbaik dalam Pemilu mendatang," ujar Slamet. (*)-d



Dr Mada Sukmajati



Para peserta workshop memperhatikan dengan serius penjelasan pembicara.



Salah satu peserta menanyakan tentang materi yang disampaikan.



Eko Suwanto ST Msi